

Peran Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan Dalam Mencapai Graduasi Mandiri KPM PKH Di Desa Mekarjaya Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang

Evi Nurhayati

Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, emailna.evi@gmail.com

Abstract

Poverty is complex and affects various aspects of life. One of the government's efforts to overcome poverty is through the Family Hope Program (PKH). PKH aims to reduce poverty rates by involving professional workers as social assistants. The role of social assistants is very much needed in efforts to improve the welfare of PKH KPM, but in Mekarjaya Village there have been no KPMs who have successfully graduated independently. This study aims to describe the role of social assistants in achieving independent graduation. The research method used is descriptive qualitative. Sampling was carried out using purposive sampling techniques. Data collection techniques used were interviews and documentation studies. After the data was collected, data validation was carried out using triangulation techniques. Data analysis techniques were carried out both before and after data collection in the field which included data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study showed that there were three roles that were carried out quite well, the first role as a motivator, social assistants provide motivation in Family Capacity Building Meeting (P2K2) activities and home visits, the second role as an educator through the delivery of all modules in P2K2, the third role as a facilitator by facilitating KPM in P2K2 activities to listen, respond, and provide space for KPM to participate in each meeting. Other roles, namely accelerator of change, liaison, social planner, mediator, and advocate have not been carried out optimally. This is because the assignment period is relatively short so that they do not understand all the needs and characteristics of KPM. In addition to the transfer of work areas,

Author correspondence email: emailna.evi@gmail.com

Available online at: <https://jurnal.poltekesos.ac.id/index.php/peksos/index>

Copyright (c) 2024 by Peksos: Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial



the burden of assisting two village areas is one of the contributing factors. Furthermore, the dependence of KPM on PKH social assistance and the target of independent graduation are challenges for social assistants.

Keywords:

*Role of PKH Social Assistant; Mandiri Prosperous Graduation;
Desa Mekarjaya.*

Abstrak

Kemiskinan bersifat kompleks dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan adalah melalui Program Keluarga Harapan (PKH). PKH bertujuan untuk menurunkan angka kemiskinan dengan melibatkan tenaga profesional sebagai pendamping sosial. Peran pendamping sosial sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan KPM PKH, namun di Desa Mekarjaya belum ada KPM yang berhasil graduasi mandiri. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peran pendamping sosial dalam mencapai graduasi mandiri. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumentasi. Setelah data terkumpul dilakukan validasi data melalui teknik triangulasi. Teknik analisis data dilakukan baik sebelum maupun sesudah pengumpulan data di lapangan yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga peran yang dilaksanakan cukup baik, pertama peran sebagai motivator, pendamping sosial memberikan motivasi pada kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dan home visit, peran kedua sebagai edukator melalui penyampaian seluruh modul dalam P2K2, peran ketiga sebagai fasilitator dengan memfasilitasi KPM dalam kegiatan P2K2 untuk mendengarkan, menanggapi, dan memberikan ruang bagi para KPM berpartisipasi dalam setiap pertemuan. Peran lainnya yakni pemercepat perubahan, penghubung, perencana sosial, mediator, dan advokator belum dijalankan secara maksimal. Hal ini dikarenakan masa penugasan yang relatif singkat sehingga belum memahami semua kebutuhan

karakteristik KPM. Disamping perpindahan wilayah kerja, beban mendampingi dua wilayah desa menjadi salah satu faktor penyebab. Selanjutnya ketergantungan para KPM terhadap bantuan sosial PKH serta target graduasi mandiri menjadi tantangan tersendiri bagi pendamping sosial.

Kata Kunci:

Peran Pendamping Sosial PKH, Graduasi Mandiri, Desa Mekarjaya

Pendahuluan

Kemiskinan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh berbagai negara terutama negara berkembang. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang tidak luput dari permasalahan kemiskinan. Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum (Mudrajad Kuncoro, 2010). Kemiskinan bersifat kompleks dan mencakup semua aspek kehidupan manusia seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, pengangguran dan aspek lainnya, sehingga harus ditangani secara serius. Salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan adalah melalui Program Keluarga Harapan (PKH).

PKH merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan atau seseorang miskin dan rentan yang telah terdaftar dalam data terpadu penanganan fakir miskin oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya di singkat KPM adalah keluarga penerima PKH yang telah memenuhi syarat. Sasaran kepesertaan PKH harus memiliki komponen yaitu kesehatan (ibu hamil dan anak usia dini), pendidikan (anak sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas), dan anak usia 6-21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun dan komponen kesejahteraan sosial (lanjut usia dan penyandang disabilitas).

KPM PKH di Desa Mekarjaya berjumlah 194 orang yang merupakan terbanyak diantara desa-desa yang ada di Kecamatan Sumedang Utara, sedangkan jumlah pendamping sosial hanya satu orang dengan tanggung jawab pada wilayah tugas dua desa. Hal tersebut tentunya menjadi catatan bagi pemerintah khususnya dalam mendorong KPM PKH agar dapat graduasi mandiri. Graduasi mandiri adalah berakhirnya kepesertaan KPM PKH karena kondisi sosial ekonomi sudah meningkat dan dikategorikan

mampu sehingga tidak layak lagi mendapatkan bantuan sosial PKH. Graduasi mandiri dapat terjadi baik atas inisiatif KPM sendiri, maupun dorongan dari pendamping sosial atau pihak lainnya. Dorongan internal dari KPM untuk graduasi mandiri di antaranya menolak bantuan karena merasamampu, tidak ingin bergantung pada bantuan sosial PKH, dan/atau ingin memberikan kesempatan kepada keluarga lain. Disamping itu KPM dapat melakukan graduasi apabila telah mengalami perubahan status ekonomi karena mendapat pekerjaan dengan penghasilan yang lebih baik, memiliki usaha atau kegiatan ekonomi yang berjalan sukses dan/atau memperoleh harta kekayaan tertentu. Sedangkan dorongan eksternal diantaranya dilakukan oleh pendamping sosial yang diberi tugas oleh Kementerian Sosial untuk membantu, mendampingi dan memberikan pelatihan kepada KPM PKH.

Sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan, pendamping sosial bertanggung jawab untuk mengelola program dengan baik. Salah satu tugas pendamping sosial adalah menyelenggarakan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dengan berbagai modul yang dipelajari meliputi modul Perlindungan Anak, Kesehatan dan Gizi, Pencegahan dan Penanganan Stunting, Pengasuhan dan Pendidikan Anak, Pengelolaan Keuangan dan Perencanaan Usaha dan modul Kesejahteraan Sosial. Melalui kegiatan tersebut para KPM PKH akan mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemandirian untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih baik sehingga diharapkan mereka dapat tergraduasi dari kepesertaan penerima bantuan PKH dan keluar dari kemiskinan. Disamping itu pendamping sosial juga melakukan home visit secara individu untuk menyelesaikan masalah maupun untuk mengetahui perkembangan KPM yang akan mencapai graduasi mandiri.

Peran pendamping sosial sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan KPM PKH, tetapi di Desa Mekarjaya belum ada penerima bantuan PKH yang berhasil melakukan graduasi mandiri. Hal ini disebabkan kesadaran diri KPM yang masih belum dapat ditumbuhkan oleh mekanisme pemberdayaan dalam program PKH dan kapasitas internal pendamping sosial dalam melaksanakan berbagai peran belum efektif. Selain itu, pergantian pendamping sosial yang tidak menentu, memerlukan adaptasi dari pendamping sosial yang baru terhadap peran-peran yang harus dilakukan. Terlebih bagi pendamping dengan tanggung jawab dalam lingkup dua desa. Pendamping sosial perlu membenahi dan memperkuat peran-perannya dalam setiap aktivitas pendampingan kepada KPM baik dalam pertemuan P2K2, kunjungan rumah, musyawarah desa, dan intervensi kepada KPM.

Uraian di atas mengindikasikan bahwa pendamping sosial PKH belum menjalankan peran dengan maksimal dan kurang melihat potensi KPM yang dapat digunakan untuk mempercepat terjadinya graduasi mandiri. Penelitian ini dilaksanakan untuk melihat bagaimana peranpendamping sosial PKH secara umum dalam mendorong KPM PKH untuk mencapai graduasi mandiri.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif denganpendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2020:7) metode penelitiankualitatif deskriptif adalah pengumpulan data yang berbentuk kata-kataatau gambar-gambar sehingga tidak menekankan pada angka. Data yangtelah terkumpul dianalisis selanjutnya dideskripsikan sehingga mudah dipahami oleh orang lain. Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran, menguraikan dan menafsirkan kondisi yang adaterkait Peran Pendamping Sosial PKH Dalam Mencapai Graduasi Mandiri KPM PKH di Desa Mekarjaya.

Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposivesampling dalam rangka memperdalam informasi, proses dan situasi sosial tertentu yakni menitikberatkan pada peran pendamping sosial dengan lokasi penelitian yang telah ditentukan dan memilih informankunci yang dapat menjawab pertanyaan. Teknik pengumpulan data yangdigunakan adalah studi dokumentasi untuk mendapatkan sejumlah datadukung riset. Menurut Nasution dalam Sugiyono (2020:124) studi dokumentasi merupakan pengumpulan data dari catatan peristiwa yangberlaku baik berbentuk tulisan, gambar/foto atau karya-karyamonumental dari seseorang/instansi.

Selanjutnya dilakukan wawancara mendalam untukmenanyakan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan pedomanwawancara yang telah dibuat sebelum pengumpulan data di lapangan. Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2020:114) wawancara merupakanpertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanyajawab, sehingga dapat dikontribusikan makna dalam satu topik tertentuSetelah data terkumpul dilakukan validasi data melalui tekniktriangulasi. Menurut Sugiyono (2020:125) peneliti yang melakukanpengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data yaitumengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan datadan sumber data. Teknik analisis data dilakukan baik sebelum maupunsetelah pengumpulan data di lapangan. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2020:133) analisis data kualitatif dilakukan secarainteraktif dan terus menerus sampai data jenuh, dengan

langkah-langkah analisis data meliputi reduksi data (data reduction), penyajian data (data display) dan penarikan kesimpulan (concluding drawing/verification).

Hasil Penelitian

Karakteristik Informan

Inisial	Jenis Kelamin	Agama	Pendidikan	Pekerjaan
S	P	Islam	D-IV	Pendamping sosial
		Y	P	Islam S1 Pendamping Sosial
YL	P	Islam	SLTA	Kasi Kesra
RN	P	Islam	SD	KPM PKH
N	P	Islam	SD	KPM PKH

Tabel 1. Karakteristik Informan

Tabel 1 menunjukkan bahwa setiap informan memiliki latar belakang pendidikan dan profesi yang berbeda. Informasi mengenai peran pendamping sosial dapat digali melalui peran sebagai pekerjasosial

Pelaksanaan Peran Pendamping Sosial Sebagai Motivator

Peran pendamping sosial sebagai motivator bertujuan untuk merubah pola pikir dan mendorong kesadaran KPM untuk melakukan graduasi mandiri. Pemberian motivasi kepada seluruh KPM dilakukan baik dalam pertemuan P2K2 maupun dalam kunjungan rumah atau home visit. Hal tersebut dilakukan untuk memantau perkembangan dan kemajuan mereka (Azzahroo & Susilowati, 2020). Dalam penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa pendamping sosial PKH Desa Mekarjaya menjalankan peran motivator dalam pertemuan P2K2 bersama kelompok KPM sebagai berikut:

“kalau peran sebagai motivator itu bisa berbagai aspek ya bu, misal untuk graduasi mandiri saya memberikan motivasi kepada KPM di saat pertemuan P2K2 untuk si KPM itu merubah polapikirnya supaya tidak tergantung terus kepada bantuan sosial. Apalagi sekarang dari Kementerian Sosial diharuskan ada KPM yang graduasi untuk

menurunkan angka kemiskinan ya, saya sebagai pendamping memotivasi aja gitu, khususnya kepadamereka yang kelihatan sudah mampu ya. Selain untuk graduasi kan kadang ada KPM yang memang tidak bisa menggunakan ATM atau KKS, ini bukan untuk graduasi tapi yang lainnya, ya sayakasih motivasi supaya pencairan itu harus dibawa masing-masingjangan dititip ke orang lain atau di agen”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pendamping sosial sudah memberikan motivasi dalam pertemuan P2K2 untuk merubahpola pikir KPM agar tidak bergantung pada bantuan sosial. Disampingitu motivasi dilakukan kepada KPM lain berupa nasihat agar bantuanyang turun tidak disalahgunakan. Pendamping sosial juga memberikanmotivasi secara individu melalui kegiatan home visit seperti penuturanpendamping sosial sebagai berikut:

“saya melakukan kunjungan ke rumahnya, nah saya ngobrol dari hati ke hati karena kita ke KPM itu ga bisa jeplak gitu ga bisa, jadi harus ngobrol dulu supaya bisa diambil hatinya. Ngobrol dulubaru ke intinya bahwa di PKH itu bagi KPM yang sudah sejahteraatau mampu harus mengundurkan diri supaya tepat sasaran Tanggapannya rupa-rupa, ya ada KPM yang mengiyakan KPMnyasadar diri mau mengundurkan diri, ada juga yang bilang gini ahbu ini mah uang dari pemerintah saya masih butuh. Nah sayatidak bisa memaksa ya karena ini harus persetujuan dari KPMnyajuga harus tandatangan di surat yang ada materainya, saya mahhanya memotivasi aja, selebihnya KPM yang memutuskan” (wawancara informan S, 2024)

Pernyataan informan tersebut menunjukkan bahwa pemberian motivasi kepada KPM sebagai tindak lanjut dari pertemuan P2K2 telah dilaksanakan dengan mengemukakan pengertian tentang graduasi mandiri sebagai target dari program PKH, namun pendamping sosial tidak dapat memaksakan diri setelah mendapat respon dari KPM tersebut. Informan S, sebagai pendamping sosial yang baru dua bulan di Desa Mekarjaya belum menemukan KPM yang akan graduasi mandiri, namun berdasarkan pengalaman di wilayah desa sebelumnya yang bersangkutan menyampaikan sebagai berikut:

“ada juga KPM yang hanya usaha kecil-kecilan tapi inginmengundurkan diri karena merasa malu. Waktu di Desa Jatimulyaada yang tiba-tiba menghubungi saya, pengen ngobrol sama ibutentang PKH, katanya saya mau mengundurkan diri ya udah sayadatangi aja ngobrol. Nah alesannya saya juga segini alhamdulillah

bu udah merasa cukup dengan usaha kecil-kecilan. Akhirnya mengundurkan diri, ada juga yang begitu jadi yagimana ya tergantung KPMnya sih, nah kadang kalau yang sudah kaya dan mampu ada juga yang masih pengen bansos, susah gitu, jadi harus lebih ekstra lagi untuk KPM yang susah” (wawancarainforman S, 2024)

Pemberian motivasi untuk graduasi mandiri oleh pendamping sosial tidak mudah dilakukan mengingat perlu adanya keinginan dan kesadaran dari KPM itu sendiri ataupun dukungan dari keluarga.

Pelaksanaan Peran Pendamping Sosial Sebagai Mediator

Peran pendamping sosial sebagai mediator dalam mendorong graduasi mandiri KPM PKH sangat penting untuk menjadi penengah di antara KPM PKH dengan pihak lainnya. Dalam melaksanakan peran mediator, pendamping sosial mengemukakan bahwa belum ada KPMPKH yang harus dilakukan mediasi untuk graduasi mandiri sebagai berikut:

“kebetulan kan didesa Mekarjaya saya baru mau home visit nanti. Nah kalau didesa sebelumnya memang ada bu saya home visit bilang gini si ibunya, nanti saya ngobrol dulu sama suami saya Pas saya tanyakan lagi ternyata memang kata suaminya ga boleh ga ngebolehin katanya masih butuh, ya mau gimana lagi ya pihak keluarganya ga mendukung, tapi ada keluarga lain yang mengizinkan” (wawancara informan S, 2024)

Pendamping sosial mengalami dilema dalam menjalankan peran tersebut karena terdapat anggota keluarga lain yang tidak mengizinkan. Keraguan untuk memaksimalkan peran ini dikarenakan ketakutan informan akan terjadi pelaporan dari KPM sebagai berikut:

“katanya saya ga bisa bu karena kuriak kuli bangunan ga tetap bu ya kalau ada kerjaan mah saya kerja, kalau tidak ada mah saya nganggur, gitu kata suaminya. Tapi kondisinya itu memang ga layak mah ga layak gitu tapi dibandingkan dengan KPM yang lain itu mah sudah sejahtera, ya karena mungkin kesadaran dirinya yang memang suka mencari alibi gitu, kan saya mah masih butuh bu. Biasa lah namanya juga KPM unik-unik lah, yasaya tidak bisa memaksa, ya kalau dipaksa mah takut nanti malah saya dilaporin lah misal saya dipaksa sama pendamping keluar saya takut nanti image saya jelek, ya saya sebisa mungkin ngasih motivasi sudah ya saya gimana si ibunya gitu, kalau sadar diri ya pasti keluar kalau engga mah saya juga akan terus memotivasi” (wawancara informan S, 2024)

Berdasarkan pengalaman tersebut, informan belum pernah melakukan mediasi terhadap KPM dikarenakan khawatir akan berdampak dan dilaporkan oleh KPM tersebut apabila ada unsur paksaan.

Pelaksanaan Peran Pendamping Sosial Sebagai Broker

Peran pendamping sosial sebagai broker/penghubung seharusnya dapat membantu KPM menjalin kemitraan dengan berbagai sumber ataupun menciptakan sumber-sumber yang baru. Pendamping sosial menjalankan peran broker dengan menghubungkan KPM kepada program PENA sebagai salah satu pilihan untuk graduasi mandiri sebagai berikut:

“oh iya, kebetulan kan kalau PENA itu harus punya usaha ya, nahkalau misalkan punya usaha saya rekomendasikan ke PENA seperti pengalaman saya di desa sebelumnya. Di Desa Kaler kansebelumnya saya megang dua Desa Jatimulya sama Desa Kaler. Jadi pendamping itu ada yang sampai tiga Desa malah, sayasekarang disini dua desa, Mekarjaya sama Jatihurip. Nah kalau Desa Kaler ada si KPM saya ajukan ke PENA, nah kebetulan si ibunya sudah siap mau graduasi, nah tapi sekarang untukprogram PENAnya belum cair masih nunggu tapi udah di proses udah ikut zoom udah dibikinin proposalnya cuman kalaupencairan masih lama gatau, sebelum puasa waktu itu di prosesnya. Rencananya yang di Desa Mekarjaya yang maugraduasi saya ajukan Program PENA, kalau memang mau si KPMnya. Kadang kan si KPMnya gamau ah mending di PKH ajakarena di PKH mah lama, kalau PENA kan cuman Rp. 2.400.000,00 yang kemarin” (wawancara informan S, 2024)

Program PENA menjadi salah satu opsi yang sering ditawarkan untuk graduasi mandiri, namun banyak KPM tidak tertarik dengan modal yang akan diberikan untuk mendukung usaha mereka, terlebih bagi mereka yang belum memiliki usaha dikarenakan program ini diperuntukkan bagi KPM yang sedang mengelola usaha sendiri.

Pelaksanaan Peran Pendamping Sosial Sebagai Advokat

Peran sebagai advokat membantu memecahkan masalah dengan menerima keluhan dan kemungkinan hambatan-hambatan yang dihadapi KPM, untuk selanjutnya membantu mencari alternatif pemecahan masalah atau mencari narasumber lain/ahli yang lebih kompeten untuk mencari jalan

keluar yang optimal. Dalam menjalankan peran ini, pendamping sosial mengkhawatirkan kemungkinan yang akan terjadi hal-hal sebagai berikut:

“ya kalau untuk graduasi mandiri rada riskan ya, kalau si KPM nyaitu yang susah harus pelan-pelan sama si KPM mah harus ngambil hatinya dulu. Kalau kelihatan layak untuk graduasi saya terus memotivasi, saya juga ga pake cara yang keras ya supaya nantinya tidak ada istilah dipaksa pendamping nih graduasi, nah supaya tidak ada kata-kata itu makanya saya ke si KPMnya itu ngobrol aja dari hati ke hati. Misalkan ada yang lain cerita bu itu mah sudah tidak layak nih kenapa masih dapat bansos, ya saya bukan membela hanya menjelaskan saja ya bu saya juga ini mau motivasi mau ke rumahya mau ngobrol, tapi bukan membela si KPMnya ya tapi menjelaskan aja dikarenakan kadang-kadang masyarakat itu suka rame setelah melihat wah udah mampu tapi masih dapat bansos tapi rame lah panas, saya mah meredakan saja supaya situasinya tidak memanas gitu, kadang ya suka di viralkan”(wawancara informan S, 2024)

Peran advokat belum pernah dilaksanakan oleh pendamping sosial saat ini, namun langkah advokasi yang dilakukan menurut pemahaman informan adalah melakukan pembelaan dengan cara halus sehingga tidak terjadi konflik dengan KPM lain.

Pelaksanaan Peran Pendamping Sosial Sebagai Fasilitator

Peran pendamping sosial sebagai fasilitator bertujuan untuk memfasilitasi kesenjangan pengetahuan, sikap dan ketrampilan KPM, serta melakukan evaluasi ketercapaian program pendampingan yang selama ini dilakukan agar KPM mampu melakukan graduasi secara mandiri. Pendamping sosial menjalankan peran fasilitator dengan memanfaatkan fasilitas yang tersedia untuk mencapai graduasi, sebagai berikut:

“Kalau ada KPM yang mau graduasi ya saya memfasilitasinya yaitu salah satunya dengan masuk ke Program PENA. Jadi KPM itu tidak hanya keluar dari PKH, ada kenang-kenangan, ada bantuan PENA. Karena prosesnya panjang, ya untuk Program PENA harus ngisi link dan lain sebagainya. Nah kalau PENA itu paling lebih kekoordinasi aja bahwa ini ada KPM yang mau mengundurkan diri, saya membantu melaporkan aja ke pihak desa, kan nanti itu harus disetorkan. Nah nanti sama pihak desa disetorkan oleh operatornya” (wawancara informan S, 2024)

Dengan demikian, peran fasilitator dilaksanakan hanya melalui pemanfaatan program PENA yang sulit bagi KPM dapat mandiri secara finansial, sehingga pendamping sosial ragu untuk melakukan perubahan dan tidak sampai pada tahap kesepakatan bersama untuk graduasi mandiri.

Pelaksanaan Peran Pendamping Sosial Sebagai Edukator

Peran edukator dilakukan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan agar KPM mandiri secara sosial maupun ekonomi melalui kegiatan kewirausahaan. Peran sebagai edukator dilakukan oleh pendamping sosial dengan memberikan edukasi mengenai graduasi mandiri sebagai berikut:

“kebetulan di Desa Mekarjaya ini belum pernah ya, belum pernah kunjungan ke rumah target yang graduasi, bukan tidak tapi belum. Nah kalau di desa sebelumnya kalau di home visit itu suka ada keluarganya, suaminya lah. Saya ngobrol juga sama suaminya, ada juga yang suaminya memang mengerti, ada juga yang suaminya ah bu saya juga masih butuh, saya kerja cuman segini-gininya. Yang penting kan saya sudah memotivasi dan mensosialisasikan, selebihnya terserah KPM karena ini harus persetujuan KPMnya. Tidak bisa saya paksa ya sudah bapa keluarsaja. Nanti bilangnya pendamping ini nyuruh saya keluar, nanti saya yang ga enak” (wawancara informan 5, 2024)

Edukasi yang diberikan oleh pendamping sosial di desasebelumnya sudah pada tahap tindak lanjut dengan dilakukan home visit namun belum diperoleh persetujuan dari KPM. Berdasarkan pengalaman tersebut, pendamping sosial belum melakukan edukasi secara home visit dan hanya melakukan edukasi melalui P2K2. Sehingga peran edukator belum dilaksanakan oleh pendamping sosial dengan maksimal. 8. Pelaksanaan Peran Pendamping Sosial Sebagai Enabler Peran pendamping sosial dalam mempercepat perubahan dapat dilakukan dengan melibatkan keluarga PM, menambah waktu dan jumlah pertemuan, serta mengadakan pertemuan berdasarkan wilayah sehingga lebih efektif. Namun pendamping sosial hanya melakukan peran enabler sebagai berikut:

“kalau untuk pemercepat perubahan, mungkin lebih ke cara saya menyampaikan, karena ini untuk merubah pola pikir kan susah kalau ke KPM. Kalau di kegiatan P2K2, saya lebih intens melakukan pertemuan untuk menyampaikan materi misalnya kesehatan gizi, meskipun ada KPM yang tidak mempunyai

balita atau tidak hamil, saya menyampaikan ini bisa disampaikan ke anak cucu ibu nanti sebagai bekal gitu mungkin lebih ke itu, atau misalkan di modul keuangan, si ibu ini tidak bisa mengatur keuangan nih jadi supaya si KPM itu bisa ya saya lebih intens saja supaya merubah pola pikir si KPMnya itu bisa cepat, tapi kalau soal hasil memang teori itu gampang tapi prakteknya susah kata KPM juga. Materi saya sampaikan sesuai sesi, agar diasampaikan ke keluarga lain". (wawancara informan S, 2024)

Peran enabler yang dilakukan bukan untuk mempercepat graduasi mandiri, melainkan hanya penyampaian modul P2K2 secara lebih intensif.

Pelaksanaan Peran Pendamping Sosial Sebagai Perencana Sosial

Dalam melaksanakan peran sebagai perencana sosial, pendamping sosial dapat melakukan penyusunan rencana sosial untuk memecahkan masalah dengan melibatkan tokoh masyarakat, pemerintah desa, dan lain-lain. Peran sebagai perencana sosial tidak dilakukan oleh informan, dapat dilihat dari pernyataan sebagai berikut:

"kalau untuk perencanaan dengan melibatkan tokoh masyarakat seperti itu sih belum ya, paling kalau untuk hal-hal kecil ajarkan pegang KKS sendiri jangan disimpan di agen, paling gitu-gitu aja sih untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Misalkan ada KKS yang disimpan di agen, atau dipegang orang lain nanti takutnya kan bansos ga aman. Paling perencanaan sambil sosialisasi saja untuk jaga-jaga". (wawancara informan S, 2024)

Dalam menjalankan peran ini, pendamping sosial tidak melakukan perencanaan sosial dengan memanfaatkan modal sosial dari lingkungan. Peranan ini akan maksimal jika melibatkan tokoh masyarakat dalam menangani kebutuhan masyarakat dan mengembangkan sumber daya masyarakat untuk membantu graduasi mandiri bagi KPM.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh informasi bahwa pendamping sosial sudah melaksanakan peran sebagai motivator, edukator dan fasilitator. Pendamping sosial sebagai motivator sudah berupaya untuk menggugah dan mendorong KPM agar memiliki tekad serta semangat untuk graduasi mandiri, tetapi KPM masih tergantung pada bantuan sosial karena penghasilan yang diperoleh belum dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran ini dilakukan secara perlahan sampai mendapatkan kesepakatan bersama dalam kegiatan P2K2 maupun home visit. Pendamping sosial memahami kebijakan mengenai target graduasi KPM dari Kementerian Sosial, sehingga hal tersebut menjadi tuntutan bagi pendamping sosial. Hal ini sejalan dengan Susilowati (2017) bahwa motivasi KPM masih rendah dan upaya pendamping yang kurang memberikan dampak positif dikarenakan tidak dilakukan secara tegas dan akurat.

Peran pendamping sosial sebagai edukator dilakukan dengan menyampaikan delapan modul dalam pertemuan P2K2 untuk menambah pengetahuan dan keterampilan KPM sehingga dapat mengelola bantuan sosial dengan baik, namun belum memberikan pengetahuan terkait graduasi mandiri dikarenakan pendamping sosial tersebut baru dua bulan melaksanakan pendampingan di Desa Mekarjaya. Pengalaman pendamping sosial di desa sebelumnya, terdapat KPM yang ingin graduasi mandiri namun anggota keluarganya tidak mengizinkan karena tidak memahami tentang graduasi mandiri sebagai target program PKH. Peran edukator ini jika dijalankan dengan ideal tentu akan merubah pola pikir dan kesadaran KPM untuk graduasi mandiri.

Peran pendamping sosial sebagai fasilitator belum dapat mendorong graduasi mandiri KPM. Pendamping sosial memfasilitasi jika ada KPM yang ingin graduasi dengan menghubungkan pada program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA). Namun informasi mengenai program PENA tersebut tidak dipaparkan secara menyeluruh dan tuntas, sehingga KPM tidak tertarik. Disamping ketiga peran tersebut, pendamping sosial juga mempunyai peran lainnya seperti mediator, broker, advokator, enabler, dan perencana sosial, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh pendamping sosial PKH di Desa Mekarjaya. Peran pendamping sosial sebagai mediator diharapkan dapat menjadi penengah diantara dua kepentingan yang berbeda, seperti KPM yang memiliki keinginan untuk graduasi tetapi bertentangan dengan suaminya yang tidak ingin keluar dari bantuan sosial PKH. Namun pendamping sosial tidak berhasil melakukan mediasi disebabkan keterampilan mediasi yang belum memadai.

Peran pendamping sosial sebagai broker bertujuan untuk menghubungkan KPM dengan lembaga pelayanan atau program lain yang dapat membantu untuk graduasi mandiri. Menurut Parsons, Jorgensen dan Hernandez (1994) tiga kunci yang harus dipahami dalam menjalankan peran sebagai broker yakni linking (menghubungkan), goods and services (barang-barang dan jasa), dan quality control

(pengontrolan kualitas). Sebagai broker, pemahaman pendamping sosial mengenai program pelayanan yang dapat diakses menjadi sangat penting diantaranya program PENA dari Kementerian Sosial. Namun pendamping sosial kurang memahami program tersebut sehingga tidak dapat menjelaskan secara komprehensif kepada KPM. Akibatnya KPM tidak tertarik untuk mengikuti program PENA. Pendamping sosial juga tidak memberikan informasi bahwa bantuan sosial PKH tidak langsung diputus pada saat mendapatkan program PENA dan menjamin bahwa program PENA tersebut akan dikontrol perkembangannya.

Peran pendamping sosial sebagai advokator dilakukan apabila sumber-sumber untuk graduasi mandiri sulit dijangkau oleh KPM PKH, namun pendamping sosial tidak memahami dan tidak pernah melaksanakan peran tersebut karena khawatir akan menimbulkan konflik di masyarakat apabila melakukan advokasi kepada KPM tertentu.

Peran pendamping sosial sebagai pemercepat perubahan dapat membantu KPM dalam mengakses sistem sumber, mengidentifikasi masalah dan mengembangkan kapasitasnya agar dapat mengatasi masalah tersebut. Pelaksanaan peran sebagai enabler hanya dilakukan melalui peningkatan intensitas P2K2. Peran ini akan maksimal jika pendamping sosial melibatkan keluarga dalam kegiatan P2K2.

Peran pendamping sosial sebagai perencana sosial tidak dilaksanakan mengingat pendamping sosial lebih terfokus pada bantuan sosial yang diterima oleh KPM agar tidak terjadi permasalahan seperti keterlambatan pencairan, potensi kerugian oleh pihak lain karena KKS tidak dipegang oleh KPM, dan kehilangan KKS. Jika peran ini dilaksanakan, maka pendamping sosial dapat mewujudkan graduasi mandiri dengan melakukan perencanaan dan pengorganisasian untuk memanfaatkan modal sosial dari lingkungan dengan melibatkan tokoh masyarakat.

Kesimpulan

Penelitian ini membahas tentang peran pendamping PKH dalam mencapai graduasi mandiri di Desa Mekarjaya Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang. Terdapat tiga peran yang dilaksanakan cukup baik oleh pendamping sosial diantaranya peran motivator yaitu dengan memberikan motivasi pada KPM dalam kegiatan P2K2 dan homevisit. Kedua, peran sebagai edukator yaitu melalui penyampaian modul dalam P2K2 seperti perlindungan anak, kesehatan dan gizi, pencegahan dan penanganan stunting, pengasuhan dan pendidikan

anak, pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha, dan modul kesejahteraan sosial. Namun peran ini belum dilaksanakan secara maksimal karena hanya melalui kegiatan P2K2 dan tidak dilakukan kepada keluarga KPM melalui kegiatan home visit. Ketiga, peran sebagai fasilitator telah dilakukan dengan memfasilitasi KPM dalam kegiatan P2K2 untuk mendengarkan, menanggapi, dan memberikan ruang bagi para KPM berpartisipasi dalam setiap pertemuan.

Dalam peran lainnya yakni mediator, broker, advokator, enabler, dan perencana sosial belum dijalankan secara maksimal oleh pendamping sosial, hal ini dikarenakan masa penugasan yang relatif singkat sehingga belum memahami semua kebutuhan dan karakteristik KPM. Disamping perpindahan wilayah kerja, beban mendampingi dua wilayah desa menjadi salah satu faktor penyebab peran-peran tersebut belum dilaksanakan dengan maksimal. Ketergantungan para KPM terhadap bantuan sosial PKH serta target graduasi mandiri menjadi tantangan tersendiri bagi pendamping sosial agar dapat memaksimalkan peran-perannya.

Beberapa saran ditujukan kepada pihak terkait yakni; 1) Kementerian Sosial, agar dapat membuat program pengembang kapasitas bagi pendamping sosial sehingga dapat melaksanakan peran-perannya dengan maksimal, menetapkan jangka waktu rotasi pendamping sosial, dan menambah jumlah SDM pendamping sosial sesuai dengan jumlah desa. 2) Pemerintah Desa Mekarjaya agar selalu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap target graduasi dan memberikan kesempatan kepada warganya yang lebih layak mendapatkan bantuan sosial PKH. 3) Pendamping Sosial, agar dapat melaksanakan perannya dengan baik sebagaimana peran-peran pekerja sosial dan menggunakan strategi, teknik, dan taktik untuk evidence based practice (praktik terbaik) dalam melakukan intervensi kepada KPM PKH untuk mencapai target graduasi mandiri.

Bibliography

- Adi Fahrudin. (2018). Pengantar Kesejahteraan Sosial. Bandung. PT Reflika Adiatama.
- Dewi Komalasari, dkk. (2023). Peran Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan dalam Mencapai Graduasi Sejahtera Mandiri (Strudi Kepada Pendamping Sosial dengan Latar Belakang gKesejahteraan Sosial dan Non Kesejahteraan Sosial). Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia
- Gemala Chairunnisa Puteri. (2021). Pentingnya Penguatan Mekanisme dan Instrumen Resertifikasi/Graduasi KPM PKH. Fakultas Ilmu Sosial dan

Ilmu Politik Universitas Indonesia

- Huraerah, A., Susilowati, E., Rusmana, A., Kurniasih, N., & ... (n.d.). The Principles of Justice in the Application of National Health Insurance Program for the Poor People in Indonesia. Migration Ikhwanul Ikhsan Armalid, dkk (2020). Studi Eksplorasi : Analisis Faktor Pendorong Ibu dan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Program Keluarga Harapan dalam Mencapai Graduasi Msndiri. Fakultas Psikologi Uiversitas Padjajaran.
- Ni Luh Putu Manasaputri Indrasawarni, dkk. (2023). Modal Sosial dalam Graduasi Mandiri Program Keluarga Harapan di Provinsi Bali. Departemen Sosiologi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) Petunjuk Teknis Graduasi KPM PKH
- Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung Alfabeta.
- Susilowati, E. (2017). Kompetensi Pekerja Sosial dalam Pelaksanaan Tugas Respon Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum di Cianjur. Pekerjaan Sosial
- Susilowati, E. (2018). Knowledge and Skills of Social Workers in Handling Children in Conflict with Law in Indonesia. Asian Social Work Journal, 3(4), 1–12. www.msosialwork.com
- Widia Lestari, dkk (2019). Pemberdayaan Rumah Tangga Menuju Kemandirian Melalui Modal Sosial pada Program Keluarga Harapan (PKH). Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret